



### ABSTRAK

April 2025, rencana dalam memperlakukan kembali sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA mulai tahun pengajaran 2025/2026 diumumkan oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebagai pembalikan dari kebijakan yang sebelumnya yang sudah dihapus dalam Kurikulum Merdeka. Keputusan tersebut telah mendapatkan kritik dari beberapa pihak dikarenakan dianggap tergesa-gesa dan belum didukung dari landasan akademik yang kuat. Artikel ini memiliki tujuan guna melakukan analisis permasalahan tersebut dengan menggunakan pandangan dari teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky, dengan menekankan pada perbedaan secara konseptual antara pembelajaran dan pembelajaran sebagai kerangka analisis utama. Metode yang digunakan adalah studi kasus berbasis data sekunder dari pemberitaan media massa dan literatur akademis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan penjurusan bekerja pada level pembelajaran (instruction) sebagai rancangan eksternal, tetapi berpotensi menghambat proses belajar (learning) yang bersifat internal apabila struktur sosial yang terbentuk mempersempit Zone of Proximal Development siswa. Artikel ini merekomendasikan agar desain penjurusan tetap memberi ruang bagi kolaborasi lintas rumpun ilmu dan scaffolding yang kontekstual.

**Kata kunci:** penjurusan SMA, belajar, pembelajaran, konstruktivisme, Vygotsky, ZPD

#### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azira, A. L. ., & Winangun, M. M. . (2026). Kebijakan Penjurusan SMA dalam Perspektif Konstruktivisme Vygotsky. *Educational Journal*, 1(4), 1346-1354. <https://doi.org/10.63822/ady6sq43>

## PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia bukan hal baru, namun ketika perubahannya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, pertanyaan tentang landasan akademisnya menjadi sulit untuk diabaikan. Itulah yang terjadi ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengumumkan pada 11 April 2025 bahwa penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA akan diberlakukan kembali mulai tahun ajaran 2025/2026. Padahal, sistem penjurusan itu baru saja dihapus pada tahun ajaran 2024/2025 sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Alasan yang disampaikan oleh pemerintah adalah adanya kebutuhan untuk keperluan penyesuaian dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan menjadi pengganti Ujian Nasional dan direncanakan mulai diujicobakan pada November 2025. Karena TKA disusun dengan dasar jalur studi dengan fokus pada mata pelajaran tertentu maka pengelompokan siswa berdasarkan jalur studi diberikan pandangan perlu untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi ujian tersebut. Namun logika ini dengan begitu cepat memunculkan kritik: apakah kebijakan pengajaran seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan alat seleksi atau justru alat seleksi yang harus menyesuaikan dengan kebijakan pengajaran?

Kritik terhadap pemerintah telah disampaikan dari penelitian yang diungkapkan oleh Darmawan (2025), yang merupakan seorang analisis kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, dikarenakan dinilai tidak mengindikasikan kekonsistensian dan belum mempunyai rencana dalam jangka yang panjang dengan jelas dalam melakukan pengelolaan system pendidikan. Pandangan yang sama disampaikan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang telah menilai bahwa langkah tersebut dilakukan dengan cara gesa-gesa mengingat bahwa keefektifitasan penghapusan penjurusan pada Kurikulum Merdeka belum pernah dilakukan pengevaluasian secara menyeluruh padahal pengevaluasian kebijakan kurikulum yang tepat membutuhkan waktu setidaknya enam tahun.

Di balik perdebatan kebijakan ini dimana terdapat persoalan lebih mendasar yang sering luput dari pembahasan publik yaitu perbedaan konseptual antara pembelajaran dan pengajaran. Kebijakan pengelompokan ini merupakan bentuk intervensi pada tingkat pengajaran yaitu sebuah desain institusional yang diterapkan dari luar diri pembelajar. Hal yang seharusnya menjadi pusat perhatian adalah apakah desain tersebut benar-benar mampu menjadi fasilitas proses belajar yang terjadi secara internal dalam diri siswa. Pertanyaan ini kemudian mengarahkan kajian untuk penelusuran bagaimana perbedaan pembelajaran dan pengajaran dapat memberikan penjelasan implikasi dari kebijakan pengelompokan SMA serta bagaimana konstruktivisme Vygotsky dapat digunakan untuk membaca secara kritis dampaknya terhadap proses belajar siswa.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka analisis terhadap kebijakan penjurusan SMA dilakukan pada artikel ini dengan menggunakan pandangan dari konstruktivisme Vygotsky dengan menjadikan perbedaan antara pembelajaran dengan pengajaran sebagai kerangka analisis utama, kesenjangan antara rancangan kebijakan dengan realitas proses belajar siswa juga diidentifikasi dan rekomendasi yang lebih memiliki fokus pada kualitas proses pembelajaran siswa dihasilkan. Pada teori konstruktivisme sosial Vygotsky telah dipilih pada konteks sosial dan interaksi diposisikan sebagai penentu utama pada proses belajar yang merupakan faktor yang paling memiliki dampak pada kebijakan penjurusan

## KAJIAN TEORI

### Belajar dan Pembelajaran: Dua Konsep yang Berbeda

Di dalam ilmu pendidikan dimana pembelajaran dan pengajaran merupakan dua konsep yang saling memiliki kaitan tapi tidak sama. Memahami perbedaan antara keduanya bukan hanya sekadar persolan istilah melainkan menjadi landasan utama dalam membangun kebijakan pendidikan yang tepat.

Dalam wacana ilmu pendidikan, belajar dan pembelajaran adalah dua konsep yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Memahami perbedaannya bukan sekadar urusan terminologi—ini adalah fondasi dari cara kita merancang kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Belajar (learning) adalah proses yang terjadi di dalam diri individu. Ia merupakan perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan, keterampilan, atau perilaku seseorang sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Gagné (1985). Proses ini bersifat internal, tidak dapat dikendalikan sepenuhnya dari luar, dan tidak selalu linear. Seseorang bisa belajar dari percakapan biasa, dari kesalahan yang dibuat, atau dari mengamati orang lain—tanpa harus berada dalam setting pembelajaran formal.

Pembelajaran (instruction) adalah upaya yang disengaja dan terorganisasi untuk menciptakan kondisi agar proses belajar dapat terjadi secara optimal (Reigeluth, 1999). Ia bersifat eksternal, dirancang oleh pendidik atau lembaga, dan mencakup hal-hal seperti kurikulum, metode mengajar, pembagian kelas, penjadwalan, dan—dalam konteks artikel ini—sistem penjurusan. Pembelajaran adalah wadah; belajar adalah isinya.

Masalah yang kerap muncul dalam kebijakan pendidikan adalah ketika perancang kebijakan menyamakan perubahan pada dimensi pembelajaran dengan perubahan pada dimensi belajar. Perubahan pada struktur penjurusan, contohnya adalah tindakan yang berada dalam tingkat pengajaran namun beranggapan bahwa perubahan tersebut dengan otomatis akan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran siswa merupakan lompatan logika yang harus dianalisis dengan kritis.

### Teori Konstruktivisme Sosial Vygotsky

Lev Semyonovich Vygotsky (1896–1934) merupakan seseorang psikolog asal Rusia dengan membangun teorinya berdasarkan gagasan utama bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif oleh individu melainkan dibentuk aktif melalui interaksi sosial. Berbeda dengan Piaget yang memfokuskan konstruksi kognitif dengan sifat individual dan diberikan pengaruh oleh factor biologis dimana Vygotsky menempatkan konteks sosial dan budaya sebagai penentu utama dalam proses pembelajaran (Vygotsky, 1978).

Konsep yang paling utama pada teori Vygotsky adalah Zone of Proximal Development (ZPD), yang diartikan sebagai jarak antara tingkat dalam perkembangan aktual yang merupakan apa yang dapat dilakukan oleh siswa dengan cara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang merupakan apa yang dapat dicapai dengan bantuan orang yang lebih berkompeten (Vygotsky, 1978). Proses belajar yang paling efektif telah terjadi pada zona ini pada saat siswa diberikan tantangan yang sedikit melampaui kemampuan mereka saat ini namun masih dapat menjembatani dengan bantuan yang lebih sesuai.

Bentuk bantuan ini kemudian dikonseptualisasikan oleh Wood et al., (1976) sebagai scaffolding yang merupakan dukungan sementara dengan diberikan oleh guru atau teman sebaya yang lebih kompeten untuk bisa membantu siswa mencapai pemahaman yang belum dapat mereka capai sendiri. Scaffolding yang efektif bersifat responsif, kontekstual, dan perlahan-lahan dikurangi seiring meningkatnya kemampuan siswa.

Selain ZPD dan scaffolding, Vygotsky juga menekankan peran bahasa sebagai alat berpikir sekaligus alat sosial. Interaksi verbal dalam proses belajar—diskusi, tanya jawab, debat—adalah mekanisme utama di mana pengetahuan dibangun secara bersama. Ini berarti kualitas lingkungan sosial di dalam kelas secara langsung mempengaruhi kualitas proses belajar yang terjadi.

### **Hasil Penelitian Terkait**

Sejumlah penelitian mendukung relevansi teori Vygotsky dalam konteks desain kurikulum. Penelitian Hattie (2009) dalam meta-analisis besar yang mencakup lebih dari 800 studi menemukan bahwa interaksi teman sebaya dan umpan balik guru merupakan dua faktor dengan efek terbesar terhadap hasil belajar siswa—keduanya merupakan manifestasi langsung dari konsep ZPD dan scaffolding Vygotsky. Mercer, N., & Littleton (2007) dalam kajian tentang collaborative talk menemukan bahwa diskusi lintas kemampuan dan latar belakang antarsiswa secara signifikan meningkatkan kualitas pemikiran kritis mereka. Wahyudi & Supardi (2020) dalam studi pada konteks SMA Indonesia menunjukkan bahwa pengelompokan siswa yang terlalu homogen—seperti yang cenderung dihasilkan oleh sistem penjurusan ketat—justru mempersempit stimulasi kognitif yang diterima siswa berprestasi rendah karena mereka kehilangan akses terhadap model belajar yang lebih kompeten. Hidayat (2021) juga mencatat bahwa perubahan kurikulum yang tidak disertai penguatan kapasitas guru dalam menciptakan scaffolding yang efektif cenderung gagal meningkatkan kualitas belajar siswa secara bermakna, terlepas dari apakah penjurusan diterapkan atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif berbasis data sekunder. Kasus yang menjadi fokus adalah kebijakan Kemendikdasmen tentang pemberlakuan kembali penjurusan SMA yang diumumkan pada April 2025, dikaji melalui perspektif konstruktivisme Vygotsky dengan mempertajam perbedaan antara belajar dan pembelajaran sebagai kerangka analisis.

### **Sumber Data**

Data bersumber dari: (1) pemberitaan media massa nasional, termasuk Detik.com dan Kompas.com, yang memuat pernyataan resmi Mendikdasmen Abdul Mu'ti, kritik dari pengamat Cecep Darmawan, dan respons P2G; (2) dokumen kebijakan terkait Kurikulum Merdeka dan Tes Kemampuan Akademik; serta (3) literatur akademis berupa jurnal ilmiah dan buku teks dalam bidang teori belajar, konstruktivisme, dan kebijakan pendidikan.

### **Teknik Analisis**

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi masalah: memetakan isu utama dari kebijakan penjurusan berdasarkan data yang tersedia. Kedua, pengkajian teoritis: menjelaskan konsep belajar dan pembelajaran serta teori konstruktivisme Vygotsky sebagai kerangka baca. Ketiga, penghubungan fenomena dengan teori: menganalisis setiap aspek kebijakan menggunakan konsep ZPD, scaffolding, dan interaksi sosial Vygotsky untuk menghasilkan penafsiran yang sistematis dan rekomendasi yang berbasis teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Kasus

Pada 11 April 2025, Mendikdasmen Abdul Mu'ti secara resmi menyatakan bahwa penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA akan dihidupkan kembali. Pernyataan ini disampaikan dalam forum halal bihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan di Jakarta. Pemberlakuannya direncanakan mulai tahun ajaran 2025/2026, bersamaan dengan persiapan TKA yang akan diuji coba pada November 2025.

Dalam skema TKA, siswa akan mengikuti dua kategori ujian: mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia dan Matematika) dan mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan jurusan. Siswa jurusan IPA dapat memilih antara Fisika, Kimia, atau Biologi; siswa IPS antara Ekonomi, Sejarah, atau mata pelajaran rumpun sosial lainnya. Kebijakan ini secara eksplisit diarahkan untuk mempermudah seleksi masuk perguruan tinggi.

Kebijakan ini langsung mendapat sorotan. Cecep Darmawan dari UPI menyebut pemerintah tidak konsisten dan tidak memiliki rencana jangka panjang yang jelas. P2G melalui Koordinator Nasionalnya, Satriwan Salim, menyatakan bahwa paling cepat dibutuhkan enam tahun untuk mengevaluasi efektivitas sebuah kebijakan kurikulum—sementara Kurikulum Merdeka baru diterapkan selama satu dua tahun sebelum hendak diubah kembali.

### Analisis Menggunakan Perspektif Konstruktivisme Vygotsky

Jika dianalisis dengan menggunakan perspektif konstruktivisme Vygotsky maka kebijakan penjurusan dengan penuh beroperasi pada tingkat pengajaran yang merupakan rancangan institusional dengan diberikan dari luar diri siswa. Pertanyaan penting yang harus diajukan adalah: apakah rancangan ini mendukung ataupun malah justru dapat membatasi proses dalam pembelajaran yang sebenarnya terjadi pada siswa?

Pertama, terkait Zone of Proximal Development dimana salah satu implikasi yang paling nyata dari sistem pengelompokan adalah terbentuknya kelompok belajar yang relatif homogen dengan dasar bidang studi. Siswa jurusan sains akan lebih banyak menjalani interaksi dengan sesama siswa sains sementara siswa sosial berinteraksi dengan sesama siswa sosial. Dari sudut pandang Vygotsky sendiri kondisi ini menjadi bermasalah karena ZPD berkembang paling optimal melalui interaksi dengan individu yang memiliki kemampuan atau sudut pandang berbeda. Ketika seorang siswa sosial tertarik pada matematika terapan tidak lagi memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara intens dengan siswa sains dalam kelas yang sama dimana potensi pengembangan ZPD nya menjadi terbatas dan begitu pula sebaliknya.

Yang kedua, mengenai scaffolding pada kerangka Vygotsky, di mana dukungan belajar yang dilakukan dengan efektif tidak hanya asalnya dari guru saja namun juga dapat diberikan dari teman sebaya yang lebih kompeten pada suatu bidang. Pada saat penjurusan dilakukan dengan kaku berdasarkan dari kelompok disiplin, keberagaman sumber scaffolding juga menjadi terbatas. Akses alami terhadap teman yang lebih kuat dalam kemampuan tertentu, contohnya adalah berpikir secara analitis tidak lagi dipunyai dari siswa yang lemah dalam bidang tersebut dikarenakan mereka ditempatkan pada jurusan yang berbeda. Hal ini bukanlah hal yang kecil, Hattie (2009) mengindikasikan bahwa hubungan antar teman sebaya merupakan hal yang paling memiliki pengaruh pada hasil belajar.

Ketiga, terkait bahasa sebagai alat kognitif sosial dimana Vygotsky memfokuskan bahwa dialog dan diskusi merupakan mekanisme utama dalam pembentukan pengetahuan. Sistem pengelompokan yang

memisahkan siswa berdasarkan klaster disiplin cenderung menciptakan “gelembung diskursif” dimana siswa sains menggunakan bahasa sains sementara siswa social menggunakan bahasa kajian sosial dengan sangat sedikit interaksi di antara keduanya. Padahal kemampuan untuk berpikir lintas perspektif yang sangat dihargai dalam kehidupan nyata justru dibentuk melalui pertemuan berbagai bahasa epistemik dalam satu ruang diskusi yang sama.

Keempat, di mana terdapat masalah yang dasar pada logika kausal dengan melandasi kebijakan ini. Penjurusan diberlakukan kembali dalam melakukan penyesuaian dengan TKA, sedangkan TKA ini dibentuk sebagai alat seleksi masuk perguruan tinggi. Hal ini memiliki arti bahwa desain dalam pengajaran menjadi terbalik di mana bukan dimulai dari cara siswa belajar dengan optimal, namun malah dari kekonsistenan sistem seleksi bekerja. Jika hal ini dilihat dari pandangan konstruktivisme, maka hal ini merupakan kekeliruan yang cukup serius. Pembelajaran dengan autentik, menurut dari pandangan Vygotsky, yang muncul dari hubungan yang bermakna dengan lingkungan, bukan dari proses yang dibentuk semata-mata dapat memenuhi tuntutan suatu teks dari eksternal.

Kelima, kebijakan ini mengabaikan konteks sosio kultural yang oleh Vygotsky diberikan anggapan sangat penting. Di dalam banyak keluarga di Indonesia dengan lebih khusus di daerah membuat pemilihan jurusan tidak selalu menjadi cerminan minat atau potensi siswa melainkan lebih diberikan pengaruh oleh tekanan orang tua atau stereotip sosial. Jurusan sains masih sering dipandang sebagai pilihan yang lebih bergengsi sehingga banyak siswa yang sebenarnya tidak memiliki minat pada bidang tersebut tetap diberikan arah ke sana. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian konteks pengajaran yang dirancang (instruction) dan kondisi motivasi internal siswa (learning) dan dalam kerangka pemikiran Vygotsky dimana pembelajaran yang penuh makna tidak dapat terjadi dalam situasi seperti ini

### **Solusi Berdasarkan Konstruktivisme Vygotsky**

Pertama, jika penjurusan tetap diberlakukan, desainnya harus menjaga keterbukaan lintas rumpun. Ini bisa diwujudkan melalui mata pelajaran wajib lintas jurusan yang mengharuskan siswa IPA dan IPS berada dalam satu kelas untuk topik-topik tertentu—misalnya etika sains, analisis data sosial, atau studi kasus interdisiplin. Dengan cara ini, interaksi yang menjadi syarat berkembangnya ZPD tetap dapat terjadi meskipun penjurusan diberlakukan.

Kedua, penguatan peran guru sebagai scaffolder yang terlatih harus menjadi prioritas paralel dengan kebijakan penjurusan. Perubahan struktural tanpa diiringi peningkatan kapasitas guru dalam menciptakan scaffolding responsif hanya akan menghasilkan perubahan administratif, bukan peningkatan nyata dalam kualitas pembelajaran. Hidayat (2021) memfokuskan hal ini dimana setiap kebijakan kurikulum akan mencapai jalan buntu apabila guru tidak dibekali kemampuan untuk menerjemahkan struktural menjadi pengalaman belajar bermakna.

Ketiga, mekanisme pemilihan jurusan harus dasarnya pada eksplorasi minat terstruktur yang bukan hanya sekadar nilai akademik atau preferensi orang tua. Sekolah perlu melakukan penguatan program bimbingan karier berbasis ZPD dimana siswa difasilitasi untuk mengeksplorasi pengalaman lintas disiplin sebelum menjadi penentu jurusan sehingga pilihan yang diambil benar-benar bisa muncul dari proses pembelajaran yang telah berkembang dalam diri mereka.

## KESIMPULAN

Kebijakan Kemendikdasmen yang mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan bahasa di sekolah menengah atas merupakan intervensi tingkat pengajaran, yaitu sebuah desain institusional yang dilakukan penerapan dari luar diri pembelajar. Permasalahan muncul ketika desain tersebut tidak disusun dengan dasar pemahaman memadai tentang bagaimana proses pembelajaran sebenarnya berlangsung.

Melalui perspektif konstruktivisme Vygotsky dimana dapat diberikan pemahaman bahwa penjurusan yang kaku berisiko mempersempit ZPD siswa karena interaksi mereka dibatasi oleh kelompok homogen secara disiplin. Scaffolding dari teman dengan latar belajar beragam merupakan salah satu mekanisme paling efektif dalam menciptakan dorongan pembelajaran yang juga menjadi berkurang. Selain itu juga mengoptimalkan pembelajaran siswa sehingga logika dasarnya bertentangan dengan prinsip pengajaran seharusnya melayani pembelajaran bukan sebaliknya.

Rekomendasi utama dalam artikel ini adalah sebagai berikut: kebijakan penjurusan yang baik harus tetap bisa menjaga ruang untuk interaksi lintas disiplin dengan disertai penguatan kapasitas guru sebagai pemberi scaffolding serta mekanisme pemilihan jurusan yang benar-benar dasarnya pada eksploitasi minat siswa. Kebijakan pendidikan yang kuat harus selalu berangkat dari satu pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah hal ini benar-benar membantu siswa untuk belajar?

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, C. (2025). Kritik pengamat soal Mendikdasmen hidupkan kembali penjurusan di SMA. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7867246>
- Gagné, R. M. (1985). *No TitleThe conditions of learning and theory of instruction (4th ed.)*. Holt, Rinehart, and Winston.
- Hadiyanto, H., & Subiyanto, S. (2020). Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran berbasis proyek di SMA. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 26(1), 32-41.
- Hattie, J. (2009). *No TitleVisible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. *Educational Psychologist*, 41(2), 111-127. [https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102\\_4](https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_4)
- Hidayat, R. (2021). Dampak transisi kurikulum terhadap kinerja guru dan hasil belajar siswa SMA di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 45–62.
- Lantolf, J. P., Thorne, S. L., & Poehner, M. E. (2015). Sociocultural theory and second language development. *Educational Linguistics*, 4, 207-226.
- Mercer, N., & Howe, C. (2012). Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory. *Learning, Culture and Social Interaction*, 1(1), 12-21.
- Mercer, N., & Littleton, K. (2007). *No TitleDialogue and the development of children's thinking: A sociocultural approach*. Routledge.
- P2G. (2025). *Pernyataan resmi P2G tentang rencana pemberlakuan kembali penjurusan SMA*. Perhimpunan Pendidikan dan Guru.
- Puntambekar, S., & Hubscher, R. (2005). Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed? *Educational Psychologist*, 40(1), 1-12.
- Reigeluth, C. M. (1999). *Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory*

- (Vol. 2). Lawrence Erlbaum Associates.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational psychology* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in teacher-student interaction: A decade of research. *Educational Psychology Review*, 22(3), 271-296. <https://doi.org/10.1007/s10648-010-9127-6>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wahyudi, A., & Supardi, E. (2020). Pengaruh kesesuaian jurusan dengan minat dan bakat terhadap prestasi belajar siswa SMA. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(2), 213–228.
- Warford, M. K. (2011). The zone of proximal teacher development. *Teaching and Teacher Education*, 27(2), 252-258. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.008>
- Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). the Role of Tutoring in Problem Solving. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 17(2), 89–100. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x>